



MENEJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN PERGURUAN TINGGI

Herni Pujiati

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
hernipujiati@unsurya.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menggambarkan sisi lain dari manajemen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi. Manajemen peningkatan mutu berbasis Lulusan Perguruan Tinggi merupakan alternatif baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas . Pengembangan manajemen sistem penjaminan mutu tersebut, didesain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Oleh karena itu, output pendidikan menuntut adanya perubahan sikap dan tingkah laku seluruh komponen yang melibitkaikan semua orang baik masyarakat dalam memandang, memahami, membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

Kajian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis. Sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Masalah mutu perguruan tinggi yang masih rendah ini, menjadi alasan pemerintah memberikan kebijakan dengan menghadirkan Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dikelola secara independen oleh perguruan tinggi bersangkutan. Kemudian dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi dilakukan secara berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan mengungkap secara analisis peran sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi.

Kata Kunci: *Manajemen Mutu; Sistem penjaminan mutu internal (SPMI)*



PENDAHULUAN

Perubahan zaman menuntut perubahan dalam semua aspek, termasuk di dalamnya adalah perubahan perguruan tinggi dalam pengelolaannya. Pengelolaan perguruan tinggi ini merupakan sebuah upaya perguruan tinggi mengikuti perkembangan zaman. Standarisasi merupakan acuan dari semua pengelolaan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Semua perguruan tinggi harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan guna terus mempertahankan eksistensinya. Masih rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia dapat dilihat berdasarkan hasil akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Sehingga pola penjaminan mutu tidak hanya dilakukan oleh eksternal saja, tetapi juga harus dilakukan secara otonom oleh perguruan tinggi sesuai dengan permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang system Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi ini bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya budaya mutu pada lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dilakukan oleh perguruan tinggi itu sendiri untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pedomannya. Penjaminan mutu pendidikan tinggi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai pelaksana untuk menghasikan generasi-generasi yang berkompeten sebagai lulusan.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah banyak melakukan berbagai upaya demi keberhasilan bidang pendidikannya. Menghadapi masa yang serba terbuka di alam demokrasi ini orang akan melakukan pilihan-pilihan rasional, utamanya dalam dunia pendidikan, termasuk dalam hal mutu (Baharun, 2012). Peningkatan mutu pendidikan secara merata adalah sebuah keniscayaan bagi eksistensi sebuah bangsa dengan tanpa membedakan identitas budaya, agama, dan suku bangsa masyarakatnya. Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar apabila bangsa ini senantiasa mengupayakan peningkatan mutu pendidikannya karena hal tersebut memang suatu kebutuhan dan keharusan demi mencapai cita-cita bangsa dan meraih tujuan pendidikan nasional secara merata dan setara.

Maka, dalam konteks keindonesiaan, tujuan pendidikan nasional terealisasi dalam tujuan dan fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Baharun, 2017), seperti dikutip sebagai berikut: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas NO 20 tahun 2003: pasal 3). Implikasi harapan itu menuntut manusia berkualitas untuk senantiasa mampu memecahkan persoalan-persoalan kebutuhan hidupnya secara mandiri yang dilandasi keimanan



dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa serta mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Strategi yang paling tepat untuk membawa manusia agar mampu menapak kualitas hidupnya dapat dilakukan dengan pendekatan pembinaan secara simuhan dan profesional

Perguruan tinggi kita sudah tertinggal dari Negaranegara lain di kawasan Asia Tenggara saja. Sehingga ini merupakan hal yang sangat ironis bagi sebuah bangsa yang besar namun sumber daya manusianya masih belum berkompeten. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu pendidikan tinggi yang merupakan aspek penentu peningkatan daya saing perguruan tinggi. Sehingga hal ini menjadi pedoman bagi terselenggaranya pengelolaan pendidikan tinggi yang dapat melahirkan mutu perguruan tinggi sebagai hasilnya. Namun system penjaminan mutu internal ini tidak semua perguruan tinggi implementasikan karena berbagai hambatan yang dimiliki oleh setiap perguruan tinggi termasuk didalamnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan sarana prasarana yang belum memadai pelaksanaan system penjaminan mutu internal. Berdasarkan permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang system penjaminan mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti) yang menyatakan 3 (tiga) system penjaminan mutu terdiri : (1) Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. (2) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) (3) Pangkalan data Pendidikan tinggi (PD DIKTI) Hal ini merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi, untuk memberikan kesempatan yang sama setiap perguruan tinggi dalam mengelola lembaganya¹. Namun tidak semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan system penjaminan mutu internal berdasarkan pendekatan manajemen didalamnya. Dibutuhkan manajemen dalam pengelolaan perguruan tinggi untuk mengakomodasi system penjaminan mutu internal dan eksternal maupun dalam mengoptimalkan pelaporan pada pangkalan data Pendidikan tinggi. Sehingga dibutuhkan manajemen system penjaminan mutu internal dalam mengembangkan sebuah perguruan tinggi dalam mencapai standarisasi akreditasi. Dibutuhkan pola system penjaminan mutu internal berdasarkan Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Permenristekdikti yang diantaranya sebagai berikut : Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terkait pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan system penjaminan mutu internal untuk menghadapi standarisasi yang sangat diperlukan oleh sebuah perguruan tinggi untuk terus bertahan melayani Pendidikan. Mengingat banyak perguruan tinggi yang diberhentikan operasionalnya karena tidak memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan badan akreditasi nasional perguruan tinggi (BAN PT)

1 Ditjen Dikti Depdiknas. (2003). Pedoman penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.



penjaminan mutu Pendidikan tinggi (SPM Dikti)..² Demi meningkatkan mutu lembaga pendidikan, hal yang tidak boleh diabaikan adalah manajemen yang digunakan. Dan di sinilah peran-peran stake holders serta share holders sangat menentukan. Dalam sebuah lembaga pendidikan, manajemen mempunyai tempat yang penting.³

Manajemen mutu dalam pelaksanaannya menuntut keterlibatan secara aktif semua anggota organisasi, mulai dari perencanaan, pengendalian dan perbaikan dan pengembangan, serta ditujukan kepada semua aktivitas yang terjadi dalam organisasi. Untuk memujudkan kondisi tersebut maka ada elemen dasar yang perlu mendapat perhatian dalam manajemen kualitas yaitu elemen implicit dan elemen eksplisit. Elemen implicit yang disebut juga dengan soft qualities yaitu suasana organisasi yang harus dibangun untuk mendukung terwujudnya tugas-tugas organisasi.⁴

manajemen yang dikemukakan oleh para ahli dan pemikir, mereka memberi penjelasan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut Stonner (1996:7) mengemukakan bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.⁵

Pengertian tersebut memberi makna bahwa manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan untuk mencapai suatu tujuan. Mutu mempunyai pengertian yang sangat beragam. Seiring waktu, konsep mutu semakin berkembang, pada saat sekarang ini pengertian konsep mutu lebih luas daripada sekedar aktivitas industri. Pengertian modern dari konsep mutu adalah membangun sistem kualitas yang modern, yang memiliki ciri: berorientasi pada pelanggan, adanya partisipasi aktif dari semua personil. Adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab untuk kualitas, adanya aktivitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan atas kerusakan, dan adanya filosofi bahwa kualitas merupakan way of life. Kata mutu adalah istilah yang relatif dan memiliki makna yang berbeda bagi tiap orang. Karenanya definisi tentang mutu sangat bervariasi, beragam dan sangat menarik untuk disimak. Secara umum, definisi mutu berdasarkan kepada orientasi seseorang individu yang terlibat di dalamnya, sebagaimana dikatakan Reeves

Kerangka pikir penelitian yang diharapkan dari pengungkapan masalah- masalah yaitu sebuah kondisi empirik mengenai manajemen mutu madrasah berbasis pondok pesantren dilihat dari proses perencanaan mutu (plan), pelaksanaan mutu , pemeriksaan mutu dan tidaklanjut

2 H. Handoko, *Manajemen edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2001: 129, 144-145).

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengambilan>

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keputusan>

⁵ J.A.F. Stoner dan C. Winkel, *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003: 205).



perbaikan mutu,⁶ manajemen yang dikemukakan oleh para ahli dan lembaga pendidikan.

Arcaro S. Jerome menyampaikan bahwa terdapat lima karakteristik sekolah yang bermutu yaitu: 1) Fokus pada pelanggan 2) Keterlibatan total 3) Pengukuran 4) Komitmen 5) Perbaikan berkelanjutan. Mutu pendidikan akan dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan, peserta didik, proses pembelajaran, sarana pendidikan, keuangan dan termasuk hubungannya dengan masyarakat.⁷ Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa. Mutu yang pertama disebut *quality in fact* (mutu sesungguhnya) dan yang kedua disebut *quality in perception* (mutu persepsi). Dalam penyelenggaraannya, *quality in fact* merupakan profil lulusan institusi pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi tujuan pendidikan, yang berbentuk standar kemampuan dasar berupa kualifikasi akademik minimal yang dikuasai oleh peserta didik. Sedangkan *quality in perception* pendidikan adalah kepuasan dan bertambahnya minat pelanggan eksternal terhadap lulusan institusi pendidikan (Hasan Baharun, 2017)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksudmaksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan, sedangkan pelaksanaannya disebut dengan manager atau pengelola.¹⁰ Jadi, tidak dapat disangkal lagi bahwa manajemen adalah suatu hal penting yang menyentuh, memengaruhi dan bahkan merasuki hampir seluruh aspek kehidupan manusia layaknya darah dan raga. Juga telah dimengerti bahwa dengan manajemen, manusia mampu mengenali kemampuannya berikut kelebihanannya serta kekurangannya. Begitu juga dalam dimensi pendidikan Islam manajemen telah menjadi sebuah istilah yang tak dapat dihindari demi tercapainya suatu tujuan. Untuk mencapai tujuannya, maka pendidikan Islam mesti dan harus mempunyai manajemen yang baik dan terarah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif analisis. Sebuah pendekatan metode yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti pada saat penelitian berlangsung. Masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang peneliti gunakan adalah

⁶ J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Strategik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996: 47 & 63).



penelitian lapangan (Field Research), yaitu penyelidikan mendalam yang dilakukan dengan suatu prosedur penelitian lapangan. Penelitian ini juga menggunakan data deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode content analysis. Sehingga dalam pengambilan data bisa fleksibel dan bisa mengembangkan pertanyaan karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan manajemen mutu pada Madrasah Aliyah. penelitian ini merekomendasikan bahwa madrasah harus tetap menjadi teamwork yang berkualitas, dalam peningkatan mutu dengan peran dan tanggung jawab yang terstruktur, dan menjadi model yang dapat dijadikan alternatif konsep untuk penelitian manajemen peningkatan mutu

HASIL dan PEMBAHASAN

Menejemen Mutu

perkembangan manajemen mutu adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga tingkat kualitas yang diinginkan oleh perusahaan. Tindakan ini mencakup rangkaian aktivitas lain seperti menentukan standar kualitas, peraturan yang diperlukan, dan aspek lain yang dapat menentukan kualitas produk atau jasa. Istilah "mutu" merupakan padanan dari istilah dalam bahasa Inggris, yakni quality, artinya, goodness or worth. Dengan demikian, secara definitif istilah mutu dapat diartikan sebagai kebaikan atau nilai. Pada mulanya istilah mutu banyak digunakan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam organisasi industri, dimana mutu diartikan sebagai karakteristik produk/jasa yang ditentukan oleh pihak pelanggan, dan diperoleh melalui pengukuran proses serta perbaikan secara berkesinambungan.⁷

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis Perguruan tinggi ini diharapkan dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain sebagai berikut: Sumber daya; sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu internal (SPMI)

⁷ Hedwig, R. & Polla, G. (2006). Model sistem penjaminan mutu dan proses penerapannya di perguruan tinggi. Yogyakarta-ta: Graha Ilmu



Adapun tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dicanangkan sebagai tingkatan minimum layanan pendidikan. SPM berlaku untuk: (1) satuan atau program pendidikan, (2) penyelenggara satuan atau program pendidikan, (3) pemerintah kabupaten atau kota, dan (4) pemerintah provinsi. Namun demikian, dalam implementasinya SPM akan membutuhkan sumberdaya yang sangat besar, kapasitas SDM serta kapasitas kelembagaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, SPM digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan implementasi SNP secara bertahap dan terprogram yang mengukur kinerja pengelolaan pendidikan. Pada dasarnya SPM memiliki dinamika yang meningkat dari waktu ke waktu menuju SNP. Pada penyusunannya, SPM dikembangkan berfokus pada layanan pada tingkat pemerintah daerah sebagai penyelenggara pendidikan dan tingkat satuan pendidikan. SPM tingkat satuan pendidikan berisi indikator yang merupakan bagian dari keseluruhan indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam batasan kapasitas anggaran, dan memiliki daya ungkit terbesar bagi peningkatan mutu/kualitas pendidikan. SPM disusun dengan komposisi yang mencerminkan perbaikan input dan proses secara seimbang dengan memperhatikan kapasitas fiskal pemerintah. Secara operasional pelaksanaan pendidikan harus merupakan realisasi dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan nasional di tengah perubahan global.⁸

Melalui pendidikan nasional setiap warga negara Indonesia diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi, baik dalam pergaulan nasional maupun internasional. Dalam hubungan ini segala upaya perlu dilakukan agar pelaksanaan pendidikan nasional dapat berhasil sehingga tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Paradigma baru dalam pendidikan menghendaki lulusan program pendidikan harus mampu bersaing di dunia internasional, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan IPTEKS serta kebutuhan dunia kerja. Dalam rangka pengawalan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut maka diperlukan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan yang dimulai dari pelaksanaan evaluasi program. Dalam manajemen sudah menjadi suatu keharusan bahwa “penjaminan mutu merupakan tonggak (milestone) dari suatu pengembangan” (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003). Pernyataan tersebut benar, apabila pengembangan merupakan perubahan yang direncanakan dan bukan suatu peristiwa yang kebetulan terjadi. Oleh karena itu perlu dipahami tentang bagaimana melakukan penjaminan mutu secara komprehensif, terstruktur dan

8 Republik Indonesia. (2003). Undang-undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.



sistematis, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar peningkatan mutu guna mencapai tujuan yang diinginkan atau dicita-citakan. Kegiatan penjaminan mutu, digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut (1) untuk memperlihatkan pencapaian mutu dari suatu institusi atau program dari institusi tersebut. (2) sebagai alat (tool) manajerial, yang ditujukan untuk menjaga agar kinerja suatu institusi atau program yang telah dicapai tetap terjaga keberlangsungannya. (3) sebagai alat manajerial, yang ditujukan untuk perbaikan program institusi. (4) sebagai alat manajerial, yang ditujukan untuk penyusunan rencana pengembangan institusi di masa mendatang.

(sumber: Art & Humanities Research Council, 2007. Understanding Your Project: A Guide to Self Evaluation).⁹

Penjaminan mutu merupakan upaya sistematis untuk menghimpun dan mengolah data (fakta dan informasi) yang handal dan sah, dari mana dapat disimpulkan kenyataan, yang dapat digunakan sebagai landasan tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program. Oleh karena itu, kemampuan untuk melaksanakan penjaminan mutu adalah suatu faktor penting untuk semua lembaga. Tanpa kemampuan untuk melakukan penjaminan mutu, tidak akan ada peningkatan kualitas yang dapat dicapai.

KESIMPULAN

Dari paparan dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi. Dapat diuraikan berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan semua proses kegiatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan dievaluasi secara otonom oleh perguruan tinggi sendiri tanpa campur tangan pihak manapun. Implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dibuat dengan menggunakan data dan informasi tentang perguruan tinggi dengan sangat jelas yang memuat data-data yang akurat, lengkap dan mutakhir. Dengan tujuannya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, efisien, produktif, dan akuntabel terhadap stakeholdersnya, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan peran dan fungsi. Oleh karenanya, dalam peran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahap pengawasan (monitoring) dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan menekankan bahwa kegiatan ini bukan mencari-cari kesalahan melainkan untuk melakukan tindakan perbaikan terus menerus.

Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan dalam pengawalan penjaminan mutu bagi para lulusan yang ada di perguruan tinggi. Dengan demikian, proses dan hasil keputusan yang diambilnya betul-betul menemukan titik temu bagi para lulusan perguruan tinggi sehingga memiliki kemampuan dalam jangka panjang.

⁹ Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 12, Tahun 2012, tentang pendidikan tinggi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ditjen Dikti Depdiknas. (2003). Pedoman penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan tinggi. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas.
- Ditjen Dikti Kemendiknas. (2010). Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi Republik Indonesia. (2003). Undangundang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
- Republik Indonesia. (2012). Undangundang Nomor 12, Tahun 2012, tentang pendidikan tinggi.
- Hedwig, R. & Polla, G. (2006). Model sistem penjaminan mutu dan proses penerap-annya di perguruan tinggi. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Handoko, H., *Manajemen edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2001: 129, 144-145).
- Harrison, E.F., *The Managerial Decision-Making Process* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1992:24-25).
- Hasan, I. Hill, *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/islam>
- <https://kbbi.web.id/adil>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keputusan>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengambilan>
- Muhdi, "Teknik Pengambilan Keputusan Dalam Menentukan Model Manajemen Pendidikan Menengah", *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional. (2007).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala sekolah/Madrasah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Salusu, J., *Pengambilan Keputusan Stratejik, Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (Jakarta: PT.GramediaWidiasarana Indonesia, 1996: 47 & 63).
- Siagian, S.P., *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993: 25-26).
- Stoner, J.A.F. dan Winkel, C., *Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dalam Manajemen*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wood, Beverly P. *Decision Making in Radiology. Radiology*. Vol. 211, 1999. <https://doi.org/10.1148/radiology.211.3.r99jn35601>.